

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Konflik selalu menjadi pembahasan yang menyita perhatian pada proses kehidupan negara di dunia ini, baik skala nasional maupun internasional. Sampai hari ini, konflik terus silih berganti, ada yang berhasil diselesaikan dan ada konflik yang baru muncul atau tercipta. Konflik internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dari satu negara dengan negara lain, baik perbedaan secara ideologi, kepentingan nasional, hingga perebutan wilayah. Kenneth Waltz beranggapan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kekuatan dari satu negara dengan negara lainnya, ketidakseimbangan itu cenderung mendorong negara kuat untuk mengintimidasi negara yang lebih lemah. Namun ada juga faktor pendorong lain yang menyebabkan konflik internasional ini terjadi, seperti tindakan diplomatik, propaganda, ancaman dan sanksi militer, dan wilayah teritorial (Artega et al., 2019).

Dalam hubungan internasional, ada kerjasama yang dilakukan oleh satu negara dengan negara lainnya, baik itu bilateral atau multilateral. Namun, kerjasama atau hubungan yang dibangun tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik, hubungan antar negara bisa saja berubah menjadi hangat bahkan panas satu sama lain, bisa karena perjanjian yang dilanggar sehingga menyinggung dan berujung dengan timbulnya konflik.

konflik wilayah kerap menjadi permasalahan yang sensitif bagi suatu negara, isu teritorial ini selalu menyita perhatian banyak negara baik negara yang ada di kawasan konflik tersebut maupun secara internasional.

Timur Tengah terdapat konflik perebutan wilayah yang selalu menjadi perhatian internasional, selain itu konflik ini termasuk kepada konflik yang berkepanjangan yaitu konflik Israel-Palestina.

Israel dan Palestina merupakan konflik yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan, baik oleh kedua negara tersebut atau bahkan keterlibatan organisasi Internasional sekalipun. Sejarah panjang mengiringi konflik kedua negara tersebut, dari awal kemerdekaan Indonesia hingga saat ini belum juga adanya penyelesaian yang jelas dan menguntungkan kedua belah pihak tersebut.

Secara historis Palestina merupakan negara yang berdiri sejak abad ke-12 SM, penduduk asli Palestina adalah orang Filistin. Kemudian dari tahun 1517 hingga 1917 kesultanan Utsmaniyah menguasai sebagian besar wilayah ini, namun pada tahun 1918 ketika berakhirnya Perang Dunia 1 wilayah Palestina ini dikuasai oleh Inggris. Inggris yang menguasai wilayah tersebut diberikan mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa dengan memberi otoritas kepada Inggris secara administratif untuk mengambil kendali, termasuk untuk mendirikan negara bagi kaum yahudi di Palestina pada tahun 1923 (Ayu Siti, 2022).

Konflik perebutan kekuasaan ini dipicu oleh deklarasi Balfour pada tahun 1917, yang mana deklarasi tersebut merupakan dukungan dan kesungguhan kerajaan Britain terhadap bangsa Yahudi untuk memiliki negara sendiri dan

berdaulat di Palestina, walaupun tanah Palestina itu diduduki oleh sebagian besar masyarakat Arab dan mayoritas muslim.(Mohd Nor, 2010)

Deklarasi tersebut menjadikan modal oleh Yahudi untuk menggapai cita-cita dan agenda Zionisme upaya untuk menaklukkan Palestina demi menyelamatkan bangsa Yahudi di Eropa yang mendapatkan penindasan dan tidak memiliki tanah yang damai untuk bermukim, bahkan mereka berpikir berkali-kali untuk menyatakan dirinya Yahudi, karena setiap Yahudi di Eropa itu selalu mendapatkan haluan dan pemaksaan. Penjajahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap bangsa Palestina adalah bentuk dari semangat deklarasi Balfour.

Eskalasi konflik Israel-Palestina mengalami peningkatan hingga saat ini, dimana bangsa Palestina terus melakukan konfrontasi terhadap tindakan-tindakan Israel yang sangat tidak manusiawi seperti penyerangan di kompleks Masjid Al-Aqsa dan penembakan masyarakat sipil yang tidak bersalah. Perlawanan masyarakat Palestina tidak sebanding dengan penyerangan yang dilakukan Israel, masyarakat sipil di Palestina kerap melakukan perlawanan dengan menggunakan batu sebagai senjata dan tidak memiliki senjata yang lebih daripada itu. Pada tahun 2018 dunia internasional diguncangkan oleh penembakan perawat perempuan yang bernama Razan al Najjar oleh tentara Israel, kronologis penembakan tersebut bermula ketika Razan bergegas untuk menolong korban yang terluka, dalam penembakan tersebut Razan al Najjar menggunakan seragam paramedis, walau sudah mengangkat tangan dengan tinggi sebagai tanda penyerahan diri, tetapi tetap saja ia di tembak mati oleh tentara Israel (BBC, 2018)

Selain itu, pada tahun 2022 Israel menyerang masyarakat Palestina di dalam Masjid Al-Aqsa. Sehingga sebanyak 158 warga sipil terluka (KOMPAS.com, 2022).

Perhatian dunia internasional terhadap nasib Palestina tidak sebanding perhatian kepada negara-negara di Eropa yang sedang mendapatkan musibah, namun itu tidak menyurutkan semangat masyarakat Palestina sebagai negara berdaulat untuk terus memperjuangkan kemerdekaan sepenuhnya, karena masih banyak orang-orang yang simpati dan empati melihat adanya tindakan yang tidak manusiawi yang dialami oleh warga Palestina. Sudah banyak kalangan yang menyuarakan terkait kemerdekaan ini, dari mulai masyarakat sipil, selebriti, atlet, bahkan pejabat publik yang mengharapkan kedamaian dan kemerdekaan bagi masyarakat di Palestina. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat luas mampu menyerap dengan apa yang terjadi di Palestina ini bukan lagi persoalan agama, akan tetapi tentang manusia dan hak di dalamnya. Namun setiap negara memiliki pembelaan tersendiri, baik kepada Palestina atau bahkan kepada Israel.

Indonesia merupakan negara yang konsisten untuk terus berupaya menyuarakan kemerdekaan Palestina, semangat perjuangan Indonesia dalam menghadapi kolonialisme di masa lalu memiliki persamaan dengan nasib rakyat Palestina saat ini. Indonesia dan Palestina memiliki sejarah yang sangat panjang, pada tahun 1974 Indonesia mengakui PLO atau *Palestine Liberation Organization*, organisasi yang didirikan oleh Yasser Arafat ini adalah bentuk keterwakilan masyarakat Palestina di dunia internasional sebagai gerakan pembebasan Palestina. 15 November tahun 1988 Palestina mendeklarasikan

kemerdekaannya, sehari setelahnya Indonesia mengakui kemerdekaan Palestina tersebut (Satrio, 2019).

Bentuk dukungan Indonesia kepada Palestina ini dilakukan dengan berbagai cara, keberpihakan kepada Palestina ini sejalan dengan penolakan terhadap Israel sebagai negara. Pada tahun 1955 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika yang mana forum tersebut merupakan wadah konsolidasi negara-negara Asia dan Afrika untuk memperjuangkan hak-hak negara yang belum memperoleh kemerdekaan termasuk pada forum tersebut terdapat pernyataan dan komitmen para peserta konferensi untuk terus mendukung Palestina supaya mendapatkan hak-haknya dan mengancam bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Selain itu, Asian Games 1962 saat Indonesia menjadi penyelenggara merupakan upaya konkrit lainnya dalam komitmen memperjuangkan hak Palestina, melalui forum olahraga yang besar itu Indonesia tidak memberikan Visa terhadap atlet-atlet Israel yang hendak mengikuti Asian Games (Yolanda, 2015).

Ada beberapa alasan mengapa Indonesia terus mendukung Palestina, darimulai amanat undang-undang dasar 1945 yang mana posisi Indonesia adalah sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan setiap negara dan mengutuk segala bentuk penjajahan, hingga kondisi masyarakat sebagai mayoritas muslim terbesar ini mengiringi setiap langkah pembelaan Indonesia kepada Palestina, baik oleh negara secara konstitusional maupun gerakan kolektif yang dilakukan oleh organisasi atau masyarakat secara Individu sendiri.

Dalam setiap forum resmi internasional lainnya Pemerintah Indonesia kerap menyuarkan dan menggalang dukungan terhadap perjuangan dan kemerdekaan Palestina, seperti pada forum pertemuan luar biasa tingkat wakil tetap negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam, wakil tetap Indonesia untuk OKI, menjelaskan bahwa posisi Pemerintah Indonesia menolak dengan keras terhadap aksi-aksi serangan yang dilakukan oleh Israel di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Indonesia mengajak kepada seluruh anggota OKI untuk terus berjuang mengentikan agresi Israel dan memastikan *status quo* masjid Al-Aqsa, memastikan bahwa isu Palestina ini merupakan isu Internasional, mendorong supaya proses perdamaian harus tetap di hidupkan, dan yang terakhir mengajak kepada seluruh anggota OKI untuk terus mendukung dan memberikan bantuan kepada rakyat Palestina yang sedang berjuang (kemlu.go.id, 2022a)

Tidak hanya pada forum OKI, pada tahun 2021 Menteri Luar Negeri Indonesia yang saat ini dijabat Retno Marsudi menegaskan pada siding Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, menyerukan PBB untuk mengambil langkah kongkret untuk menghentikan kekerasan dan aksi militer Israel, memastikan bahwa akses kemanusiaan dan perlindungan dan mendorong negosiasi multilateral. Dalam forum tersebut juga dengan tegas Retno Marsudi mengatakan bahwa akar permasalahannya adalah penjajahan, dan ia menyebut Israel telah melakukan penjajahan (Eva Mazrieva, 2021).

Bentuk nyata dukungan terhadap Palestina, hingga saat ini Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Semangat Indonesia dalam memperjuangkan hak kehidupan rakyat Palestina ini tidak lepas dari andil

masyarakat didalamnya. Indonesia dengan mayoritas Islam memiliki persamaan visi dengan organisasi Islam di Indonesia yang sama-sama sepakat untuk terus mendukung Palestina.

Persatuan Islam (PERSIS) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan berbasis agama di Indonesia yang ada sejak 1923. Persis turut aktif dalam menanggapi isu nasional dan juga isu Internasional. Eksistensi Persatuan Islam sebagai organisasi non pemerintah pada dasarnya tidak hanya bergerak pada bidang dakwah Islam saja, melainkan turut berperan aktif pada bidang kehidupan lainnya seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bahkan di bidang politik.

Pada bidang pendidikan Persatuan Islam memiliki pesantren dari mulai tingkatan taman kanak-kanak hingga Universitas, bidang sosial Persis memiliki badan otonom SIGAB atau siaga bencana yang melayani hal-hal yang sifatnya sosial terutama bencana, di bidang ekonomi Persis memiliki Laz atau lembaga amal zakat yang memang orientasinya terhadap zakat, dan pada bidang politik Persis dibawah Bidang Jamiyah memiliki bidgar Siyasa Jamiyah dan kebijakan Publik.

Dalam sejarahnya, gerakan dakwah Persis memiliki kaitan yang kuat dengan politik, kiprah tokoh dan organisasi ini turut memberikan sumbangsih bagi pergerakan nasional dari mulai masa kemerdekaan hingga saat ini yakni masa reformasi. Pada kancah politik nasional di awal kemerdekaan, Persis tercatat sebagai anggota istimewa dari Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Mohammad Natsir yang merupakan tokoh Persis juga salah satu Ketua Umum Masyumi, ketokohan dan pemikiran Mohammad

Natsir memberikan warna bagi politik Indonesia hingga saat ini. Persis menegaskan bahwa semua orang Islam wajib turut serta dalam pembangunan kehidupan politik di Indonesia, hal itu diserap pada setiap tulisan-tulisan A. Hassan, Isa Anshary, dan Mohammad Natsir, bahkan tertuang dalam Manifesto organisasi, dan fatwa-fatwa ulama Persis (Anas & Dkk, 2015),

Hingga saat ini, Persis terus menjaga eksistensi dan kontribusi terhadap politik di Indonesia, dari mulai Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Daerah. Ketua Umum saat ini Dr. K.H Jeje Zaenudin menegaskan bahwa Persis akan menyipakan kader-kader potensial untuk menghadapi pemilihan Legislatif, Pilkada, dan menghadapi pemilu 2024 mendatang dan juga akan berkoordinasi dan komunikasi dengan setiap partai yang memiliki kesamaan visi dan aspirasi yang sama dengan Persis (Dhanyawan Haflah, 2022).

Pada tingkat Daerah, sebagai contoh Pimpinan Daerah kabupaten Tasikmalaya menggelar program pendidikan politik yang bertajuk Nadwah Siyasa, pendidikan politik ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman kepada setiap kader Persis di Kabupaten Tasikmalaya untuk menyelaraskan pemahaman politik bagi seluruh jamiyyah dan sebagai upaya kolektif jamiyyah Persis agar turut aktif juga dinamis memiliki sika politik yang berdasar kepada asas kebermanfaatan umat (Dhanyawan Haflah, 2023).

Persis memiliki peran untuk menjadi mitra strategis pemerintah dan mitra kritis pemerintah, mitra strategis artinya siap berkolaborasi dengan pemerintah baik penyerahan program maupun dukungan terhadap program-program pemerintah dan mitra kritis Persis terhadap pemerintah ialah dengan cara mengkritisi terhadap hal-hal yang sudah melenceng pada kordior Negara



Indonesia ini. Tidak hanya aktif pada isu-isu nasional, Persis turut serta dalam isu-isu internasional seperti konflik Israel dan Palestina.

Sebuah konflik perlu ada jalan penyelesaian yang tidak merugikan kepada salah satu pihak, terlebih dampak dari konflik yang sifatnya militeristik itu memiliki dampak buruk yang sangat luas, mulai dari banyaknya korban yang berjatuhan hingga kondisi sebuah negara yang mengalami keterpurukan dari berbagai sektor memang sudah seharusnya konflik seperti Israel dan Palestina ini harus diakhiri, terlebih saat ini dunia selalu menggaungkan akan hak manusia yang seutuhnya. Satu-satunya alasan mengapa konflik Israel dan Palestina ini harus selesai adalah faktor kemanusiaan, apalagi perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban pada konflik tersebut. Saat ini banyak aktor yang terlibat dalam interaksi dunia internasional, negara bukan satu-satunya aktor yang mampu menyelesaikan atau terlibat dalam konflik

Dukungan PERSIS dalam masalah Palestina dilakukan melalui mengikuti sikap pemerintah dan melakukan program kemanusiaan. Pada konflik Israel dan Palestina, Persatuan Islam atau PERSIS memandang bahwa ini Israel telah melakukan penjajahan dan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia di Palestina, hal itu karena tindakan-tindakan tidak manusiawi dan bersifat agresif yang selalu dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Karena itu Persatuan Islam selalu mengupayakan untuk mendukung dan menyuarakan bahwa Palestina sebagai negara berdaulat harus merdeka sepenuhnya. Pembelaan yang kerap dilakukan oleh Persis adalah dengan mengeluarkan pernyataan sikap secara resmi serta melakukan program bantuan langsung ke Palestina. Program-program bantuan kemanusiaan yang sudah Persis jalankan

antara lain adalah, pada tahun 2018 PERSIS berkolaborasi dengan Darut Tauhid membuat mobil kesehatan atau *mobile clinic*, pada bulan Mei 2021 Persis melakukan aksi bela Al-Aqsa secara virtual dengan menggalang dana, dalam aksi tersebut terdapat rangkaian acara sambutan oleh Ketua Umum KH, Aceng Zakaria, orasi oleh perwakilan Pimpinan Pusat Persatuan Islam Dr. Jeje Zaenudin, serta dilanjutkan dengan orasi dan informasi perkembangan situasi Palestina oleh Syekh Mahmoud Abu Bakar. Selain itu, pada bulan Juni 2021 PERSIS mengirmkan bantuan berbentuk satu unit ambulans dan satu unit container serta pangan untuk 400 keluarga, selimut untuk 500 keluarga, 50 unit lemari, 125 toren air, dan sumur siap minum untuk masyarakat Palestina. Selanjutnya pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022 PERSIS kembali memberikan dua unit ambulan dengan dua kali pengiriman.

PERSIS turut berkontribusi terhadap masyarakat Palestina dengan terus memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat Palestina, selain itu PERSIS memiliki program bantuan yang sifatnya tetap atau rutin setiap tahun seperti Qurban pada hari raya Idul Adha, buka bersama setiap bulan Ramadhan, santunan kepada para janda yang suaminya menjadi korban dari konflik Israel dan Palestina.

Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh PERSIS ini terhubungan dengan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta dengan Kementerian Luar Negeri. Selain bermitra dengan Pemerintah, PERSIS juga senantiasa berkolaborasi dengan NGO seperti Darut Tauhid dan NGO yang berada di Palestina untuk penyuluhan bantuan yang telah dikumpulkan.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **Upaya Advokasi Persatuan Islam (PERSIS) Sebagai Aktor Transnasional Terhadap Konflik Israel-Palestina.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“bagaimana upaya advokasi transnasional PERSIS terhadap masyarakat Palestina dalam konflik Israel-Palestina?”**

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut. Upaya advokasi Kemanusiaan Persatuan Islam terhadap Palestina dalam perodesasi 2018-2022 dikarenakan mengacu kepada masa periode ketua umum.

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konflik Israel dan Palestina
2. Untuk mengetahui krisis kemanusiaan dalam konflik Israel dan Palestina

3. Untuk mengetahui upaya PERSIS dalam mengadvokasi masyarakat Palestina pada konflik Israel dan Palestina

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengukur seberapa jauh pemahaman serta kemampuan penulis dalam menganalisa isu di bidang Studi Ilmu Hubungan Internasional dengan pembelajaran yang sudah diperoleh penulis selama belajar di perguruan tinggi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan atau sumber literature untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk penelitian mengenai Studi Ilmu Hubungan Internasional.
3. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.